



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



## Knowledge Analysis Of The Council In Affecting Regional Financial Supervision: Community Participation And Public Policy Transparency As Moderating Variables

Analisis Pengetahuan Dewan Dalam Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah: Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi

Susan Grace Veranita Nainggolan

Akuntansi, STIE Eka Prasetya, Indonesia

### Keywords:

*Supervision of the financial, knowledge of the council, Community participation, transparency of public policy*

**Abstract.** *The definition of regional financial supervision is an action taken to ensure that regional revenues and regional expenditures do not deviate from the plans outlined in the budget. In this study, samples were taken of all members of the Regency and City DPRD, especially Simalungun Regency, Pematang Siantar City, and Tebing Tinggi, using a questionnaire which was then analyzed using multiple regression. The test results show that the Board's Knowledge of the Budget has a significant positive effect on Regional Financial Supervision. Community participation has a significant positive effect on the effect of the board's knowledge of the budget on regional financial supervision. Public policy transparency has no significant effect on the effect of the board's knowledge of the budget on regional financial supervision, The interaction between the knowledge of the board and public participation has a significant negative effect on regional financial supervision, the interaction between the knowledge of the board and transparency of public policies has no effect on regional financial supervision.*

Corresponding author\*

Email: [veragolan22@gmail.com](mailto:veragolan22@gmail.com)



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



## 1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh Rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah membuat Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor/XV/MPR/1998, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan perwakilan rakyat daerah terhadap tindak lanjut badan pemeriksaan keuangan, yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya, mengatur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 terjadi perubahan yang signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah karena kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan yang sama dan bersifat sejajar menjadi mitra, Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik didaerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah adanya indikasi kelemahan dalam pengelolaan dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai peraturan dan undang undang yang berlaku, dan masih rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga fungsi anggota dewan dalam pengawasan keuangan, akibatnya banyak terjadi sejumlah masalah dalam penyusunan, pelaksanaan, termasuk di daerah tempat peneliti melalui Opini BPK di jelaskan beberapa masalah dalam laporan keuangan di kabupaten Simalungun, Kota pematang siantar, dan Tebing tinggi yang sudah merupakan pengetahuan masyarakat luas, Kenyataan tersebut secara gamblang bisa kita ketahui dari makin sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah berawal dari penyelewengan



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



dana di daerah, sedangkan dari transparansi kebijakan publik keterbukaan tentang anggaran masih minim dapat di lihat dari susah nya mengakses tentang anggaran dari pemerintah, sehingga perlunya evaluasi dalam pengawasan keuangan daerah di pemerintahan, menurut Yudono (2002) dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003 ; 1162 ) bahwa pengetahuan yang di butuhkan dalam pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, dengan mengetahui tentang anggaran di harapkan anggota dewan dapat mendeteksi kebocoran dan pemborosan anggaran. Fenomena seperti ini sudah sering terjadi di Negara ini, beberapa hal tersebut merupakan masalah yang menarik dan penting untuk di teliti, melihat dari fungsi Lembaga legislatif ada tiga yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran.

Dampak lain yang muncul dengan adanya otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan good governance sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan dengan hal itu maka peran dewan menjadi sangat meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintahan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, 2) serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal yaitu BPK, yang merupakan Revisi dari PP Nomor 105 Tahun 2000.

Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran ataukah disebabkan masalah lain. Disamping itu apakah partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan dewan. Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Pramono (dalam Coryanata, 2007). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang di lakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan kebijakan publik.

Penelitian sejenis pernah dilakukan Rima roseptallia (2006), Dalam penelitian ini mengambil sample anggota komisi "c" dan anggota panitia anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan kuisioner yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, kedua interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, dan ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Kemudian pada penelitian Yesi Mutia Basri (2008) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Beberapa peneliti yang hubungan antara kualitas dewan dengankinerjanya diantaranya (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutarnoto, 2002). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



kualitas Dewan yang diukur dengan Pendidikan, Pengetahuan, Pengalaman, dan Keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Semetara Pramono (2002) bahwa faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana. Penelitian yang menguji apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh Sopanah (2002). Ia menemukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Begitu juga ditemukan adanya hubungan interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat adanya hubungan signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Oleh karena belum ditemukannya variabel-variabel yang dapat berinteraksi antar pengetahuan anggaran dengan pengawasan yang dilakukan oleh dewan, penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian Rima roseptalia, 2006 dengan wilayah yang berbeda dan seluruh anggota DPRD yang bertugas di Kabupaten simalungun, Kota Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Anggaran

Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif, biasanya dalam unit moneter Halim dkk., (dalam Rima, 2006). Sementara Mardiasmo (2002) memberikan definisi mengenai anggaran, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran atau proses penyusunan anggaran adalah proses pengoperasioanal rencana dalam bentuk pengkuatifikasian, biasanya dalam bentuk unit moneter, untuk kurun waktu tertentu Halim dkk.(dalam, Rima 2006 ); jadi penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Menurut Anthony dan Govindarajan (dalam Rima, 2006) proses penyusunan anggaran pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama yaitu: (1) menyelaraskan dengan rencana strategik, (2) untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam organisasi, (3) untuk memberikan tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta (4) untuk encapai kerjasama. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung aspek yang bersifat politis sehingga proses penganggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai proses politik bukan hanya proses ekonomi. Penyusunan anggaran di dalam institusi publik berkaitan dengan proses penentuan alokasi jumlah dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas pemerintah dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan implementasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat dan ditetapkan. Proses penyusunan anggaran



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan atau strategi yang sudah disusun.

## **Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD**

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk mendukung akuntabilitas pemerintah daerah di samping diperlukan pengawasan yang bersifat internal juga diperlukan pengawasannya yang bersifat eksternal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan secara internal selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, BPKP, serta DPR dan DPRD sehingga akan diperoleh suatu laporan pelaksanaan pemerintahan yang diperoleh berdasarkan prosedur *check and balances*. Dalam penelitian ini, proses pengawasan akan difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, DPRD memiliki bagian khusus yang disebut Panitia Anggaran.

Pengawasan yang dilakukan DPRD atau Dewan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan minta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui *post audit* melalui pemeriksaan di tempat (Sopannah dan Mardiasmo, 2003).

## **Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran**

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Achmadi (2002) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan Zainuddin (dalam Rima, 2006). Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun, serta dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan Zainuddin dkk (dalam Rima, 2006).

Partisipasi dalam penyusunan anggaran tersebut juga meningkatkan kinerja, sikap dan kepuasan kerja terhadap anggaran. Hal tersebut penting karena Penentuan alokasi dan distribusi setiap kegiatan mutlak hanya di tentukan oleh Eksekutif, dan DPRD secara tertutup (Gedeona, 2005: 250) Partisipasi dan pengaruh individu didalam proses penganggaran merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Dewan di dalam pencapaian tujuan penganggaran.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



Menurut Anthony dan Govindarajan (2003) partisipasi didalam penyusunan anggaran mempunyai efek yang positif, dengan alasan:

1. Ada penerimaan yang lebih besar dari tujuan anggaran jika mereka merasa berada dalam pengendalian manajer, dibandingkan dengan adanya paksaan dari luar. Hal ini menuju kepada tanggung jawab individu untuk mencapai tujuan.
2. Hasil partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif. Besarnya anggaran yang telah disetujui merupakan hasil kesepakatan antara ahli dan pembuat anggaran atau penyusun anggaran.

## Transparansi Kebijakan Publik

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk Informasi Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (UU No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah). Sistem Informasi Keuangan Daerah tersebut dimaksudkan sebagai serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

Mardiasmo, 2003, menyebutkan Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran,
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,
4. Terakomodasinya suara/usulann rakyat,
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Tampak bahwa transparansi kebijakan khususnya kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variable yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, dalam rangka menuju pemerintahan yang baik.

Kerangka pemikiran teoritis ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari, pengetahuan dewan yang merancang anggaran, dan yang



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

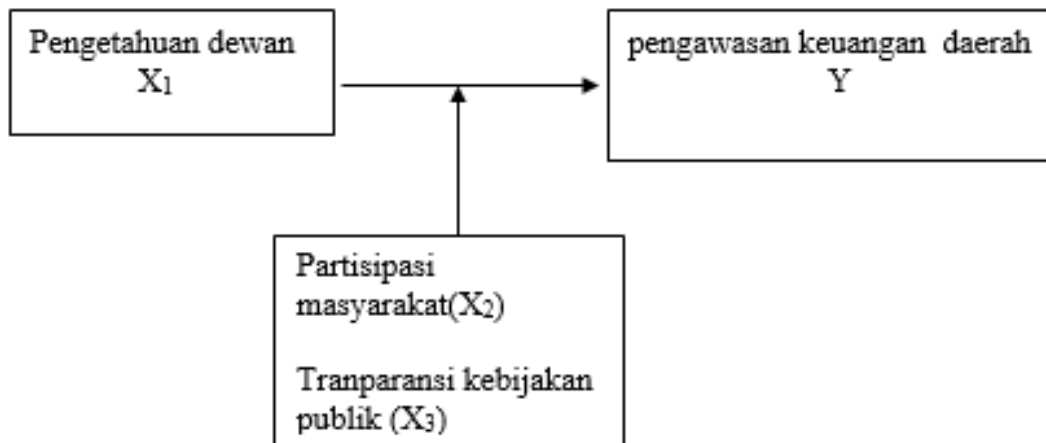
(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



mengetahui terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran, partisipasi masyarakat dalam arti keterlibatan masyarakat dalam setiap aktifitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran, dan transparansi kebijakan publik yang menjadi sumber informasi yang mudah di akses oleh masyarakat , terhadap variabel dependen yang berupa pengawasan keuangan daerah, pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).

Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar 2.6 Pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel.



Gambar 1. Kerangka Teoritis

### 3. METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD yang ada di kabupaten/kota khususnya Kabupaten Simalungun, kota Pematang siantar, dan Tebing tinggi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. yaitu seluruh anggota dewan kabupaten Simalungun, kota Pematang siantar, dan Tebing tinggi.

Masing-masing kelompok responden yang mengembalikan kuisisioner yang telah diisi akan dijadikan sampel penelitian. Untuk itu, kuisisioner-kuisisioner dari responden akan diseleksi terlebih dahulu agar mendapatkan kuisisioner yang terisi secara lengkap sebagaimana yang dikehendaki peneliti untuk kepentingan analisis.

Metode Pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



instrumen kuisisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Operasional penyebaran kuisisioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuisisioner secara langsung ke kantor DPRD. Setiap paket kuisisioner terdiri dari dua bagian yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat didalam setiap bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan yang berhubungan dengan data demografi- responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan dan jabatan. Bagian kedua adalah pernyataan yang berhubungan dengan pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat,transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah.

Data-data dalam penelitian ini harus diuji secara verifikatif oleh sebab itu jawaban deskriptif yang didapat oleh responden perlu diverifikatifkan terlebih dahulu dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah salah satu cara untuk menentukan skor dengan memberikan pertanyaan kepada responden dan memilih salah satu jawaban yang ada.

Uji-uji yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu ujia instrumen, uji asumsi klasik dan teknik analisis data dengan regresi linear berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1X_2 + b_5X_1X_3 + b_6X_1X_2X_3 + e \tag{1}$$

Keterangan :

- Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
- X1 = Pengetahuan Anggota Dewan
- X2 = Partisipasi masyarakat
- X3 =Transparansi kebijakan publik
- X1X2 = interaksi antara X1 dan X2
- X1X3 = interaksi antara X1 dan X3

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

**Tabel 1**  
**Karakteristik Responden**

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
Pria	29	82,9%
Wanita	6	17,1%
<b>Pendidikan Tertinggi</b>		
SLTA	9	25,7%
Akademi / D3	0	0%
S1	23	65,7%



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



S2	3	8,6%
S3	0	0%
<b>Usia Responden</b>		
21 – 35 tahun	2	5,7%
36 – 45 tahun	25	71,4%
> 46 tahun	8	22,9%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa dari 35 orang responden terdapat 29 orang (82,9%) di antaranya adalah responden Pria, sedangkan 6 orang (17,1%) lainnya adalah responden wanita. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, komposisi responden penelitian ini sebagian besar didominasi oleh responden pria. Terdapat 9 orang (25,7%) di antaranya memiliki pendidikan tertinggi SLTA, 23 orang (65,7%) memiliki pendidikan tertinggi S1, dan 3 orang (8,6%) memiliki pendidikan tertinggi S2. Mengacu pada distribusi pendidikan tertinggi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan tertinggi S1 dan SLTA. Usia responden yang disajikan dalam Tabel di atas tampak bahwa, dari 35 orang responden terdapat 25 orang (71,4%) di antaranya berusia antara 21-35 tahun; 2 orang (5,7%) di antaranya berusia antara 36-45 tahun, dan 8 orang (22,9%) di antaranya berusia lebih dari 46 tahun. Mengacu pada distribusi usia responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia antara 36-45 tahun.

## Uji Validitas

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>1. Pengetahuan Dewan</b>			
No	<i>Corrected Total Corelation</i>	r tabel	Keterangan
1	.581	0,32	Valid
2	.775	0,32	Valid
3	.796	0,32	Valid
4	.606	0,32	Valid
<b>2. Partisipasi Masyarakat</b>			
No	<i>Corrected Total Corelation</i>	r tabel	Keterangan
1	.598	0,32	Valid
2	.439	0,32	Valid
3	.372	0,32	Valid
4	.547	0,32	Valid
5	.422	0,32	Valid
6	.371	0,32	Valid
7	.446	0,32	Valid
<b>3. Transparansi Kebijakan Publik</b>			
No	<i>Corrected Total Corelation</i>	r tabel	Keterangan
1	.378	0,32	Valid
2	.812	0,32	Valid



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



3	.790	0,32	Valid
4	.574	0,32	Valid
5	.801	0,32	Valid
<b>4. Pengawasan Keuangan Daerah</b>			
No	<i>Corrected Total Correlation</i>	r tabel	Keterangan
1	.711	0,32	Valid
2	.446	0,32	Valid
3	.433	0,32	Valid
4	.404	0,32	Valid
5	.461	0,32	Valid
6	.510	0,32	Valid
7	.760	0,32	Valid
8	.403	0,32	Valid
9	.796	0,32	Valid
10	.583	0,32	Valid

Variabel Pengetahuan tentang Anggaran diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 4 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis korelasi product moment yang telah dilakukan terhadap kuesioner tersebut ternyata besarnya *Corrected Total Correlation* > *rtabel* ( $df = 35$ ) sebesar 0,32. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0.32 maka butir kuesioner layak dilakukan terhadap kuesioner pengukur variabel Pengetahuan tentang Anggaran.

Variabel Partisipasi Masyarakat diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 7 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis korelasi product moment yang telah dilakukan terhadap kuesioner ternyata besarnya *corrected Total Correlation* > *rtabel* = 0,32. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0.32; maka seluruh butir kuesioner layak dilakukan terhadap kuesioner pengukur variabel Partisipasi Masyarakat.

Variabel Transparansi Kebijakan Publik diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 5 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis faktor yang telah dilakukan terhadap kuesioner tersebut, ternyata hasil *Corrected Total Correlation* lebih besar dari *rtabel* = 0,32. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0.32; maka butir kuesioner layak dilakukan terhadap kuesioner pengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik.

Variabel Pengawasan Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 10 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis korelasi product momen yang telah dilakukan terhadap kuesioner tersebut ternyata hasil *Corrected Total Correlation* lebih besar dari *rtabel* 0,32. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0.32; maka butir kuesioner layak dilakukan terhadap kuesioner pengukur variabel Pengawasan Keuangan Daerah.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Alpha-Cronbach	Keterangan
1	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	0,845	Reliabel
2	Partisipasi Masyarakat	0,736	Reliabel
3	Transparansi Kebijakan Publik	0,854	Reliabel



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



4	Pengawasan Keuangan Daerah	0,842	Reliabel
---	----------------------------	-------	----------

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap masing-masing kuesioner pengukur variabel penelitian di atas tampak bahwa, masing-masing kuesioner memiliki nilai Alpha-Cronbach > 0.70; sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Mengacu pada hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik layak digunakan sebagai alat pengumpul data, karena telah memenuhi validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan.

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas Data**

Variabel	Kolmogorov Smirnov-test	Signifikansi	p-value	Interpretasi
Unstandardized Residual	1,324	0,060	p > 0,05	Normal

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai kolmogorov-smirnov Z sebesar 1,324 dengan P = 0,060, yang berarti H0 yang menyatakan distribusi data bersifat normal dapat diterima.

**Tabel 5**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Variabel yang dikorelasikan	Korelasi Spearman	sig
X1 dengan X2	0,278	0,106
X1 dengan X3	0,115	0,510
X2 dengan X3	0,062	0,723

Berdasarkan hasil analisis korelasi Spearman di atas tampak bahwa, masing-masing variabel bebas memiliki korelasi Spearman dengan nilai absolut residual yang tidak signifikan (p > 0.05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas sehingga memenuhi asumsi tersebut.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 6**  
**Uji Multikolinearitas**

Variabel Bebas	VIF
X1	1,060
X2	1,055
X3	1,024

Berdasarkan hasil perhitungan VIF yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa, masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



masing variabel bebas tidak menunjukkan adanya multikolinieritas yang signifikan, sehingga asumsi tersebut terpenuhi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah memastikan bahwa tidak memiliki masalah asumsi klasik. Selanjutnya dilakukan analisis regresi pada setiap model regresi dengan analisis regresi linear berganda. Berikut hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.100	13.733		.226	.823
Pengetahuan Dewan	2.509	1.013	2.903	2.477	.020
Partisipasi Masyarakat	.953	.450	1.624	2.117	.043
Transparansi Kebijakan Publik	.685	.496	.913	1.379	.179
X1X2	-.064	.030	-2.929	-2.130	.042
X1X3	-.061	.056	-1.896	-1.078	.290
X1X2X3	.001	.001	1.316	.916	.367

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 3.100 + 2.509 X_1 + 0.953 X_2 + 0.685 X_3 + (-0.064) X_1X_2 + (-0.061) X_1X_3 + 0.001 X_1X_2X_3 + e$$

Konstanta sebesar 3,100 berarti bahwa pengawasan laporan keuangan bernilai konstan sebesar 3,100 jika tidak dipengaruhi variabel Pengetahuan dewan, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Koefisien b1 sebesar 2,509 berarti variabel Pengetahuan Dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah sebesar 2,509 atau berpengaruh positif yang artinya jika penempatan kerja ditingkatkan 1 kali saja maka pengetahuan dewan tentang anggaran akan meningkat sebesar 2.509. (Asumsi faktor lain konstan). Koefisien b2 sebesar 0,953 berarti variabel partisipasi masyarakat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah sebesar 0.953. Jika partisipasi masyarakat ditingkatkan 1 kali saja maka pengawasan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0.953. (asumsi faktor lain konstan). Koefisien b3 sebesar 0.685 berarti variabel transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengawasan keuangan daerah sebesar 0.685. Jika partisipasi masyarakat ditingkatkan 1 kali saja maka pengawasan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0.685. (asumsi faktor lain konstan). Koefisien b4 sebesar -0.064 berarti interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar -0.064. Jika interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat ditingkatkan 1 kali saja maka pengawasan keuangan daerah akan menurun sebesar 0.064. (asumsi faktor lain konstan).

Koefisien  $b_5$  sebesar -0.061 berarti interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar -0.061. Jika pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik ditingkatkan 1 kali saja maka pengawasan keuangan daerah akan menurun sebesar 0.061. (asumsi faktor lain konstan). Koefisien  $b_6$  sebesar 0.001 berarti interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar 0.001. Jika interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik ditingkatkan 1 kali saja maka pengawasan keuangan daerah akan menurun sebesar 0.001. (asumsi faktor lain konstan).

Analisis Uji t untuk masing-masing variabel independent adalah Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa: Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh Nilai thitung  $X_1$  sebesar  $2,477 > t$  tabel sebesar 2,034 dengan probabilitas  $X_1 = 0,020 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan anggota dewan tentang Anggaran memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah yang dilakukannya.

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa: Partisipasi masyarakat mempengaruhi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai thitung = 2,117 > ttabel = 2,034 dengan probabilitas  $0,043 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa, Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah.

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa: Transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis nilai thitung = 1,379 < ttabel = 2,034 dan probabilitas  $0,179 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa, Transparansi kebijakan publik berpengaruh tidak signifikan pada pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Semakin tinggi tingkat kemampuan anggota terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya akan semakin baik. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif signifikan pada pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah. Semakin baik partisipasi masyarakat maka pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah akan semakin baik. Transparansi kebijakan publik berpengaruh tidak signifikan pada pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



Agar proses pengawasan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih baik, sebaiknya perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Dengan partisipasi masyarakat yang lebih baik, maka proses pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan akan lebih baik bahwa anggota dewan bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Selain itu yang perlu mendapat peningkatan atau perbaikan adalah transparansi kebijakan publik. Dengan kebijakan yang lebih transparan akan mampu mengurangi kemungkinan dewan untuk berbuat tidak benar sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Bagi para peneliti lain yang berminat mengkaji ulang penelitian ini sebaiknya dapat melakukannya di beberapa daerah/kota sehingga diperoleh responden atau sampel yang lebih banyak, sedemikian rupa generalisasi hasil penelitian akan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Adib Adib, Muslim Mahmuddin,, Rusmiyatri, Siti, dan Sonny, 2002. Good Governance dan Penguatan Instistusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Anthony, Govindarajan, Sistem Pengendalian Manajemen, Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Basri Yesi Mutia, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 8 Nomor 1, 2008 : 29 - 39
- Fakultas Ekonomi. 2009. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program S1. Medan
- Ghozali, imam. 2005 Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim A., Achmad Tjahjono, dan Muh. Fakir Hesein, Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi Revisi. UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000.
- Hairr, et al, Multivariate Data Análisis, Fifth Edition, Prentice-Hall Internasional, New Jersey, 1998.
- Hendrikus Tribiwanto Gedeona. 2005. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi Di Tingkat Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi, Bandung STIA LAN, Vol 2 No 3 : 250
- Lie Liana Jurnal teknologi informasi DINAMIK volume XIV No. 2, Juli 2009: 90-97
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta.
- Pramono, Agus H., 2002, Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan perwakilan rakyat daerah terhadap tindak lanjut badan pemeriksaan keuangan

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.

Rubin, Irene, 1996. Budgetting for Accountability: Municipal Budgetting for the 1990s, Jurnal Public Budgetting& Finance, Summer.

Sjamsudin, Syamsiar, 2001. Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap Partisipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten Malang, Laporan Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Sosial, vol. 3, No.2, Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, erta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik ndonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa UndangUndang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Yudono, Bambang, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, <http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela.3.htm>, 2002.

Zainuddin dkk., Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.